

# MENGEMBANGKAN EKOSISTEM SENI DAN BUDAYA DI IBU KOTA BARU INDONESIA TANPA JAWANISASI DENGAN MENGINTEGRASI BUDAYA PASER

## *DEVELOPING AN ART AND CULTURE ECOSYSTEM IN INDONESIA'S NEW CAPITAL WITHOUT JAVANIZATION BY INTEGRATING PASER CULTURE*

**Antonius Satrio Wicaksono, Pratama Dharma Surya,  
Isradina Paricha, Hafis Vian Yudha Ardhana**

Banyan Art, Heritage Kolektif, Universitas Gadjah Mada, Laurensia Dhamma Viriya,  
Museum Affandi, Lelaku Studio, Komda DIY-Jawa Tengah  
E-mail: [banyanartage@gmail.com](mailto:banyanartage@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The capital shifting of Indonesia from Jakarta to Nusantara Capital in East Kalimantan considers various factors. Besides building offices, housing, and business centers, the establishment of Nusantara Capital pays attention to the art and culture ecosystem. The development of this ecosystem needs to disconnect Javanization to create a capital city that reflects the diversity of Indonesia. Through literature review and descriptive-qualitative analysis, this research proposes the implementation of multiculturalism as an approach to embodying Bhinneka Tunggal Ika in Nusantara Capital. Multiculturalism should start by integrating the culture of the Paser, the natives of the Nusantara Capital area. Practical steps include in-depth research into the cultural history of the Paser ethnic, participant observation to formulate social policies, and artist residencies to create an artistic atmosphere inspired by local wisdom. The involvement of local artists and references is crucial in ensuring the accommodation of local community perspectives. The results of this research hopefully provide insight for policymakers.*

**Keywords:** art, culture, integration, javanization, multiculturalism

### **ABSTRAK**

Perpindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta menuju IKN di Kalimantan Timur didasarkan oleh berbagai faktor. Pembangunan IKN tidak hanya berfokus pada perkantoran, perumahan, dan sentra bisnis, tetapi juga memperhatikan pengembangan ekosistem seni dan budaya. Pengembangan ekosistem tersebut perlu terlepas dari Jawanisasi guna mewujudkan IKN yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Melalui studi pustaka dan analisis secara deskriptif-kualitatif, penelitian ini berupaya mengusulkan pemanfaatan multikulturalisme sebagai pendekatan untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika di IKN. Multikulturalisme dapat dimulai dengan mengintegrasikan budaya suku Paser selaku penghuni asli wilayah IKN. Langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan meliputi riset mendalam sejarah budaya suku Paser, observasi partisipatoris untuk merumuskan kebijakan sosial, dan residensi seniman untuk menciptakan atmosfer berkesenian yang terinspirasi dari lokalitas. Pelibatan pelaku seni dan referensi lokal menjadi krusial dalam memastikan perspektif lokal. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi pemangku kebijakan.

**Kata Kunci:** seni, budaya, integrasi, Jawanisasi, multikulturalisme

## **PENDAHULUAN**

Indonesia akan merelokasi ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Pemindahan ini pada mulanya diwacanakan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2019. Selain karena ancaman bencana seperti banjir, pemindahan ibu kota juga didorong oleh konsentrasi penduduk dan

kontribusi ekonomi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional yang dominan di Pulau Jawa, krisis air dan konversi lahan yang tinggi di Jakarta, kemacetan dan polusi udara yang tinggi akibat pertumbuhan urbanisasi, hingga penurunan daya dukung lingkungan seperti penurunan muka



air tanah, penurunan kualitas air, dan kenaikan air laut (Kementerian PPN/Bappenas, 2021: 1-4).

Wacana pemindahan ibu kota direalisasikan melalui payung hukum UU No. 3 Tahun 2022 (diperbaharui dengan UU No. 21 Tahun 2023). Realisasi ini ditandai dengan dimulainya proyek pembangunan infrastruktur dasar di wilayah bakal ibu kota baru yang oleh pemerintah diberi nama Nusantara. Wilayah tersebut memotong sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara dengan cakupan daratan seluas 252.660 ha dan perairan laut seluas ± 69.769 ha. Adapun alasan dipilihnya Kalimantan Timur mempertimbangkan berbagai faktor. Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2021: 9), terlepas dari tersedianya lahan milik pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kalimantan Timur memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan serta berposisi di tengah wilayah Indonesia sehingga mencerminkan keadilan. Masyarakat juga dinilai terbuka terhadap pendatang dan minim potensi konflik sosial. Ditambah lagi, Pulau Kalimantan tergolong sebagai pulau yang minim bencana alam.

Dalam mengurus pemindahan ibu kota dan penyelenggaraan pemerintahan daerah Nusantara, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) selaku lembaga yang berwenang tidak semata-mata membangun perkantoran, perumahan, atau sentra bisnis. OIKN juga beritikad untuk turut membangun ekosistem seni dan budaya di Nusantara kelak. Niat tersebut telah secara gamblang terdengar pada saat diskusi Institut Kesenian Jakarta bersama dengan OIKN pada 3 Agustus 2023. Kala itu, kedua lembaga menyelenggarakan diskusi bertajuk “Membangun Ekosistem Seni dan Budaya di Ibu Kota Nusantara,” di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, yang rekamannya dapat pula disaksikan di kanal *Youtube* masing-masing lembaga. Dalam kegiatan tersebut, Kepala OIKN pada saat itu, Bambang Susantono, menyebutkan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) akan dibangun sebagai kota yang futuristik namun tetap sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wajah Indonesia dengan tetap mempertahankan kearifan lokal (*local wisdom*) yang ada.

Pernyataan tersebut dapat dipandang sebagai perhatian terhadap ranah seni dan budaya, dan kesadaran akan pentingnya membangun kota yang hidup nan humanis. Akan tetapi, penting untuk diperhatikan bahwa dalam sejarah, upaya mengembangkan kebudayaan di Indonesia seringkali terbalut dengan Jawanisasi. Contoh yang pernah terjadi di IKN adalah pada saat prosesi selamatan di Titik Nol. Acara diselenggarakan dengan potong tumpeng alih-alih menurut tradisi etnis yang lain, khususnya tradisi kenduri setempat Kalimantan. Walau terkandung makna yang positif dalam tradisi selamatan khas Jawa tersebut, tidakkah fenomena ini justru kurang mencerminkan pembangunan IKN demi Indonesia yang adil, merata, dan tidak lagi jawasentris?

Berangkat dari fenomena tersebut, tulisan ini hendak mengkaji secara deskriptif-kualitatif dampak Jawanisasi dan bagaimana langkah mengembangkan ekosistem seni dan budaya di Ibu Kota baru dengan terlepas dari Jawanisasi. Kajian ini berupaya memberi pandangan dan masukan kepada pemangku kebijakan terkait. Dalam merumuskan langkah yang tepat, penting untuk mendiskusikan keberagaman Indonesia dan mempertimbangkan eksistensi budaya suku Paser selaku penduduk asli wilayah IKN. Selain itu, potensi konflik lahan ataupun perubahan identitas budaya juga perlu mendapat perhatian sehingga penting untuk melakukan integrasi dan memahami sejarah serta nilai-nilai budaya suku Paser sebagai landasan kebijakan yang efektif.

Dalam kajian ini, dilakukan studi pustaka sebagai metode pengumpulan data. Sejauh ini, belum ditemukan kajian yang menyoroti fenomena Jawanisasi dalam konteks pengembangan ekosistem seni dan budaya di IKN, serta menawarkan integrasi budaya Paser. Oleh karena itu, kajian ini berorientasi membawa pembaruan dari berbagai kajian sebelumnya yang banyak berfokus pada pembangunan infrastruktur, dampak ekonomi pemindahan ibu kota, maupun kajian-kajian yang mendeskripsikan permasalahan masyarakat adat. Beberapa kebaruan yang dapat digaribawahi dalam studi ini diantaranya adalah analisis historis mengenai pengaruh budaya Jawa dalam pembentukan identitas nasional dan

dampaknya terhadap kebijakan-kebijakan, uraian mengenai bagaimana fenomena Jawanisasi dapat membatasi ekspresi budaya lokal di Kalimantan, hingga tawaran pendekatan bagi terwujudnya integrasi budaya Paser.

## PEMBAHASAN

### *Latar belakang Jawanisasi di Indonesia*

Suku Jawa memiliki konsepsi etika dan gaya hidup yang kerap disebut dengan jawanisme atau kejawen. Sistem pemikiran Jawa yang melandasi peradaban kejawen, termasuk di dalam pemikiran itu yakni kosmologi, mitologi, dan konsepsi mistik, bersumber dari elemen-elemen kebudayaan yang secara umum berasal dari zaman Hindu-Buddha namun melalui proses sinkretis khususnya dengan agama Islam (Mulder, 2001: 2-4). Dalam sejarahnya, penyebaran agama Islam di Jawa dimulai dan kokoh di Pantura, namun ketika masuk ke pedalaman yang dihuni oleh masyarakat aristokratis, Islam justru terpengaruh skema budaya dan pemerintahan tradisional (Thornton, 1972: 16). Peradaban yang berpusat di keraton-keraton Surakarta dan Yogyakarta adalah buah dari perpaduan tersebut. Kaum *priayi*, sebagai kelas sosial pejabat atau bangsawan keraton yang menjalankan pemerintahan harian di bawah kuasa Belanda, berperan penting dalam kelangsungan peradaban Jawa meskipun kesadaran kultural tersebar luas pada segala kalangan, termasuk kaum *santri* yakni masyarakat yang mendalami Islam namun tetap terhubung tradisi, dan kaum *abangan* yakni masyarakat umum yang terikat tradisi tetapi tidak mendalami Islam.

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial menerapkan Politik Etis sebagai balas budi Belanda terhadap penduduk pribumi di Hindia-Belanda. Dampak dari Politik Etis adalah meningkatnya jumlah jabatan pemerintahan dan banyak didirikannya fasilitas pendidikan di Jawa guna mempersiapkan masyarakat menduduki jabatan tersebut. Kesempatan ini dimanfaatkan umumnya oleh anak-anak dari latar belakang *priayi* dan bagi kalangan luar Jawa yang berasal dari kaum pedagang Muslim modernis. Melalui pendidikan Barat tersebut, selain menjelma menjadi guru, dokter, atau insinyur, para pelajar

turut menjadi kaum intelektual penggerak kebangkitan nasional. Dengan kata lain, mereka yang memotori nasionalisme dan kelak menduduki posisi elit di negara Indonesia merdeka adalah orang-orang yang umumnya berkaitan dengan kejawen terlepas dari detradisionalisasi yang mungkin terjadi.

Walaupun begitu, pada sekitar awal kemerdekaan orang-orang dari suku selain Jawa maupun orang-orang Jawa dari kaum bukan *priayi* turut terlembagakan dalam organisasi-organisasi nasional. Thornton (1972) menjelaskan saat itu terdapat 5 organisasi utama dengan aneka subbudaya politik: Partai Komunis Indonesia (PKI) mewakili komunisme, Partai Nasional Indonesia (PNI) mewakili nasionalisme, Nahdlatul Ulama (NU) mewakili Islam tradisional, Masyumi mewakili Islam modernis, dan angkatan darat mewakili militer. Menurutny, walaupun kelimanya mempunyai paradigma berbeda, orang-orang dari lingkungan tradisional Jawa hadir di 4 dari 5 organisasi tersebut. *Priayi* hadir di PNI dan angkatan darat, *santri* hadir di NU, dan masyarakat *abangan* hadir di PKI. Sementara itu, Masyumi sebagai partai Islam modernis tren di luar Pulau Jawa. Sepanjang era revolusi, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, hingga orde baru, politisi asal luar pulau Jawa yang kebanyakan tergabung dalam Partai Masyumi dan belakangan dalam Partai Sosialis Indonesia memainkan peranan dominan atau setara dengan orang Jawa hanya ketika keadaan darurat singkat selama revolusi dan setelah Gerakan 30 September (G30S) tahun 1965, menunjukkan betapa politik Indonesia hanya bisa dimainkan oleh elemen-elemen yang menyerahkan diri pada jawanisme (Thornton, 1972 : 58-59). Tidak heran jika kemudian pada masa orde baru orang Jawa berjumlah banyak di pemerintahan. Estimasi yang dibuat beberapa sumber menyebut angka 90% dari total, dan tinjauan tahun 1971 terhadap 207 pejabat tinggi di birokrasi pusat mengungkapkan bahwa 71% dari mereka adalah etnis Jawa (Smith, 1971: 39 dalam Thornton, 1972: 59).

Dominannya suku Jawa dan juga individu-individu yang terpengaruh budaya Jawa dalam elite pemerintahan pada awal negara Indonesia

berdiri berbanding lurus dengan kuatnya pengaruh budaya Jawa di kancah nasional. Kebutuhan untuk mengikat persatuan di antara begitu banyak bangsa, budaya, dan bahasa diakomodasi oleh konsepsi-konsepsi yang diinspirasi dari literatur Jawa kuno. Dasar negara Pancasila dicetuskan Soekarno dengan mengutip kitab *Negaraker-tagama* karangan Mpu Prapanca, sedangkan semboyan negara *Bhinneka Tunggal Ika* diusulkan oleh Mohammad Yamin, yang justru orang Minangkabau, dengan mengutip kitab *Sutasoma* karangan Mpu Tantular. Menurut Niels Mulder (2001: 99-100), slogan-slogan marak dijumpai pada masa awal pendirian negara dan kian membanjir di era Orde Baru, mengesankan upaya menguasai perpolitikan dengan “mantra-mantra sakti”, seperti *Kebangkitan Nasional Kedua*, *Pelita* (*Pembangunan Lima Tahun*), *UUD 1945* (*Konstitusi 1945*), atau *Ipoleksosbudhankam*. Hal yang menarik, budaya Jawa langsung membersamai kelahiran Orde Baru yang dibuka dengan mantra *Supersemar* (*Surat Perintah Sebelas Maret*). Surat yang dikatakan berisi perintah Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto untuk memulihkan ketertiban dalam negeri itu memiliki singkatan yang seolah menekankan superioritas Semar, tokoh yang diyakini merupakan dewata, leluhur orang Jawa, dan dikenal hanya mendukung pemenang. Kepanjangan *Supersemar* yang mengandung tanggal juga mencerminkan kebiasaan orang Jawa untuk membuat *candrasengkala*.

Fenomena-fenomena tersebut merupakan bentuk dari *Jawanisasi*. *Jawanisasi* merupakan suatu imperialisme budaya yang memaksakan pola pikir dan perilaku orang Jawa di seluruh Indonesia secara sadar ataupun tidak sadar atau hanya sekedar penyebaran penduduk Jawa ke luar Pulau Jawa (Mulder, 2005: 51). Istilah ini dapat dipahami sebagai proses di mana subjek budaya Jawa, baik orang Jawa maupun orang dari etnis lain yang terpengaruh budaya Jawa, secara sadar maupun bawah sadar menempatkan elemen-elemen budaya Jawa untuk mendominasi di antara budaya lain, menjadi standar atau penentu identitas nasional, sehingga mendorong individu dari suku lain untuk berlaku ala Jawa. Selama pemerintahan Presiden Soeharto (1967-1998), menjadi Jawa merupakan kehormatan

dan kebudayaan Jawa memiliki kesempatan luas untuk berkembang. Hal ini tercermin dalam konsep ideologi tunggal Pancasila yang berakar pada spiritualitas Jawa. Soeharto menyebutkan Pancasila sebagai sebuah konsep yang dipahami dan dihidupi dengan baik oleh etnis Jawa, namun cenderung kompleks dan harus dicoba dipahami oleh etnis non-Jawa salah satunya melalui program pendidikan *Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila* (Ward, 2010: 31-36). Sebagai pendukung penanaman pemahaman Pancasila ini, Soeharto juga mencanangkan program transmigrasi penduduk etnis Jawa ke pulau-pulau lain, membentuk diaspora etnis Jawa di daerah pedalaman yang memperkuat posisi Jawa sebagai pusat Indonesia (Elmhirst, 2000 dalam Tridakusumah dkk., 2015: 249). Akan tetapi, setelah lengser di tahun 1998, dorongan untuk menjawanisasi menurun sehingga politisi dan tokoh-tokoh luar Jawa tidak lagi begitu memerhatikan suku Jawa maupun kejawaan (Sutarto, 2006: 40).

Kendati demikian, sejak dulu hingga sekarang *Jawanisasi* tidak berhenti dan hadir dalam berbagai aspek kehidupan. Pada sektor pangan, misalnya, *Jawanisasi* tercermin pada kebijakan swasembada pangan yang mengencarkan beras sehingga berpotensi melenyapkan kearifan lokal Indonesia timur yang biasa mengolah sagu sebagai sumber karbohidrat. Dalam budaya kain, tercermin pada motif batik kedaerahan yang mulai muncul setelah UNESCO mengakui batik sebagai *Intangible Cultural Heritage* (ICH) atau Warisan Budaya Tak Benda pada tahun 2009 lalu. Batik yang identik dengan goresan malam atau lilin pada sebuah kain dan berasal dari tanah Jawa mulai diaplikasikan ke lokasi-lokasi lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akhirnya memiliki motif batiknya sendiri (Nisa, 2023). Fenomena serupa juga tercermin pada batik Papua. Tampaknya tidak ada yang salah untuk mengaplikasikan motif batik di NTT, akan tetapi kekhasan kain tenun di sana dapat terancam hilang dengan masuknya motif dan kain batik yang bukan berasal NTT.

Terkini, seperti yang telah diutarakan pada subbab pendahuluan, *Jawanisasi* hadir pada acara resmi di ibu kota baru dalam wujud potong tumpeng. *Slametan* merupakan sebuah

tradisi umum dan sederhana dalam kebudayaan Jawa untuk merayakan, memperbaiki, ataupun menyucikan suatu lokasi, kegiatan, hingga peristiwa tertentu melalui kesatuan spiritual dan sosial dari setiap yang terlibat dengan disertai makanan yang khas, atribut tertentu, lantunan doa, dan penyampaian pesan atau pidato (Geertz, 1960: 11). Akan tetapi dengan diselenggarakannya potong tumpeng, hal ini menunjukkan bahwa aspek budaya Jawa kembali diprioritaskan dibanding kekayaan budaya lokal Kalimantan ataupun tradisi lain di Indonesia.

Fenomena ini akan membawa berbagai dampak apabila dibiarkan. Pertama, tertutupnya identitas budaya lokal yang seharusnya turut diapresiasi. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman atau bahkan ketidaksenangan dari masyarakat setempat yang merasa budaya mereka terpinggirkan. Kedua, terjadi homogenisasi budaya di mana kenyataan budaya di Indonesia yang heterogen menjadi tereduksi dalam satu pola budaya yang didominasi oleh unsur-unsur Jawa.

Fenomena ini akan membawa berbagai dampak apabila dibiarkan. Pertama, tertutupnya identitas budaya lokal yang seharusnya turut diapresiasi. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak nyaman atau bahkan ketidaksenangan dari masyarakat setempat yang merasa budaya mereka terpinggirkan. Kedua, terjadi homogenisasi budaya di mana kenyataan budaya di Indonesia yang heterogen menjadi tereduksi dalam satu pola budaya yang didominasi oleh unsur-unsur Jawa. Oleh sebab itu, langkah-langkah konkret yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan dan dampak yang ada terkait ekosistem seni dan budaya di IKN adalah menyediakan rekomendasi kebijakan yang spesifik dan praktis yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait. Pentingnya pendekatan kolaboratif antara pemerintah, pelaku seni dan budaya, serta masyarakat lokal untuk menghasilkan solusi yang efektif dan berkelanjutan, pengembangan program pelatihan dan dukungan keuangan untuk pelaku seni dan budaya lokal, pembangunan infrastruktur seni dan budaya yang inklusif, serta promosi dan pelestarian referensi lokal yang menjadi identitas budaya suku Paser.

Multikulturalisme sebagai penerapan Bhinneka Tunggal Ika: Memulai dari budaya Paser

Dengan urgensi melakukan de-Jawanisasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merumuskan ekosistem seni dan budaya di IKN akan menjurus pada pertanyaan: Seperti apakah konsep dan wujud budaya IKN tanpa Jawanisasi? Dalam mengawali jawaban pertanyaan ini, ada baiknya menengok landasan segala aspek budaya yang seharusnya dibangun di Indonesia yang juga menjadi cara pandang pembangunan IKN, yakni Bhinneka Tunggal Ika. IKN, seperti disebutkan oleh UU No. 3 tahun 2022 pasal 2 butir C, “Menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Pasal 3 ayat 1 butir F lebih lanjut menegaskan bahwa undang-undang IKN dibentuk dan dilaksanakan berdasarkan asas kebhinekatunggalikaan. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 36A UUD 1945, yang dikutip dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kakawin yang ditulis di bawah situasi sosio-politik Majapahit ini memiliki makna “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Meskipun diambil dari kitab Jawa kuno, Bhinneka Tunggal Ika tampaknya dapat dipahami dengan baik pada masa diputuskannya frasa tersebut sebagai semboyan negara pada tahun 1945. Sebab, secara signifikan tiada yang memperlmasalahkannya. Namun bila dikritisi, makna dan implementasinya di masa kini begitu kabur secara praktis, hingga tampak ketidakmampuannya menjadi dasar Peraturan Perundang-undangan ketika terjadi perpecahan konflik suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Riyanto dkk (2023) telah menyoroti isu ini dan telah menawarkan solusi, yaitu dengan memformulasikan Bhinneka Tunggal Ika dalam wujud pasal yang berdiri sendiri di dalam konstitusi (melalui amandemen UUD 1945), sebab penyebutannya dalam Pasal 36A UUD 1945 hanya sebagai penjelasan dari simbol negara (burung garuda). Seharusnya peran Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan

negara ditegaskan penjelasannya dan diturunkan dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan di bawahnya (Riyanto dkk., 2023: 9). Selagi usulan tersebut belum dilaksanakan, tulisan ini berusaha menawarkan implementasi nilai Bhinneka Tunggal Ika melalui proyeksi praktik guna mengembangkan ekosistem seni dan budaya di IKN tanpa Jawanisasi.

Sehubungan dengan definisi Bhinneka Tunggal Ika yang belum dapat dituangkan secara praktis, maka tulisan ini menggunakan terminologi lebih luas yang sekiranya dapat menjadi landasan de-Jawanisasi tanpa mereduksi Bhinneka Tunggal Ika, yaitu multikulturalisme. Multikulturalisme adalah pandangan yang mengakui keberadaan banyak kebudayaan dalam satu wilayah (Tilaar, 2004 dalam Tridianto, 2005: 29). Aktualisasi dari sikap menerima keberagaman budaya seperti yang dimaksud dari multikulturalisme sejatinya sudah dilakukan nenek moyang bangsa Indonesia setidaknya sejak terjadi Indianisasi (Coedès, 2015: 64). Kendati demikian, pengembangan ekosistem seni dan budaya yang multikultural di IKN perlu didahului dengan pemetaan budaya-budaya yang membentuk multikulturalisme di Indonesia. Hal ini tidak mudah karena memerlukan riset terhadap banyak sumber dari berbagai budaya dengan konteks zamannya, sementara IKN diproyeksikan mulai beroperasi pada tahun 2024. Karena alasan tersebut, tulisan ini berusaha merancang pendekatan yang menjadi langkah awal aktualisasi multikulturalisme dengan cara mengakomodasi unsur-unsur budaya masyarakat suku yang menjadi penghuni asli kota Nusantara. Jika suku Paser sebagai representasi lokal berhasil mendapat tempat dalam ekosistem seni dan budaya IKN, maka upaya-upaya untuk mengangkat representasi-representasi suku lain di Indonesia menjadi lebih mungkin untuk dilakukan – termasuk representasi budaya Jawa sebagai salah satu elemen pembentuk multikulturalisme dan bukan penentu.

Suku Paser adalah suku asli Kalimantan yang menghuni wilayah selatan dari Provinsi Kalimantan Timur yang terkonsentrasi di area Pemerintah Daerah Kabupaten Paser (Putra, 2017: 78). Suku ini dijadikan fokus dalam tulisan mengingat IKN didirikan tepat di atas tanah

yang telah dijaga suku Paser selama ratusan tahun. Demi pembangunan dan urbanisasi yang akan dikembangkan pemerintah, tanah tempat mereka tinggal dan menghidupi kebutuhannya sehari-hari telah dibeli dan kini mereka terpaksa berpindah tanpa tahu benar harus bertahan hidup dengan pekerjaan apa, atau bagaimana cara menyesuaikan diri dengan urbanisasi yang secara instan akan masuk di IKN (Sucipto, 2023). Dengan kondisi masyarakat budaya asli yang seakan mulai termarjinalkan, maka keberadaan budaya yang dimilikinya ikut terancam. Suku Paser dapat saja enggan menghidupi budaya mereka apabila budaya tersebut tidak lagi dapat membantu mereka bertahan hidup. Berubahnya budaya suku Paser merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari dari urbanisasi di IKN, tetapi tidak berarti warga asli suku Paser harus meninggalkan budaya aslinya tanpa jejak demi dapat bertahan hidup.

Di sisi lain, proyek perpindahan Ibu Kota akan menjadi simbol “modernitas” dan peradaban masa depan Indonesia sehingga akan menjadi pusat perhatian internasional. Sehubungan dengan itu, urgensi untuk mengangkat budaya suku Paser juga meningkat. Gencarnya gerakan dekolonisasi di berbagai sektor seni dan budaya secara global akan membuat Indonesia, sebagai salah satu negara multikultural di dunia, mendapat sorotan terkait dengan proses integrasi budaya urban dan tradisional dalam proyek IKN. Pemerhati isu dekolonisasi akan memantau apakah proyek ini abai begitu saja pada budaya asli daerah terkait atau mengintegrasikannya, dan hal ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengakomodir sektor seni dan budaya.

### ***Mengkaji praktik integrasi budaya Suku Paser dengan urbanisme IKN***

Budaya di Kalimantan Timur terbagi menjadi tiga bagian besar, yaitu budaya Keraton, Pesisir, dan Urban (Abidin, 2023). Hal ini bermula dari diangkatnya sultan-sultan sekitar tahun 1478 oleh bangsa Melayu (Islam), diantaranya Brunei, Sambas, Pontianak, Pasir, Banjarmasin, Samarinda dan Balungan (Hermanu, 2010). Dimensi budaya asli Suku Paser tercatat berakar sejak masuknya Islamisasi oleh Indra Jaya (dikenal

sebagai utusan Sunan Giri) pada abad ke-16, ketika suasana di Jawa panas akibat peperangan Demak dengan Majapahit (Putra, 2017: 98-99). Indra Jaya kemudian menikah dengan Puteri Didalam Petung yang telah mengucap 2 kalimat syahadat, tercatat pada tahun 931 Hijriyah atau 1443 Masehi, dan mulai berdirilah kerajaan Paser yang berbentuk kesultanan. Kasultanan Pasir sendiri dianggap pendatang baru di wilayah tersebut dan merupakan kelompok tertua yang ada di Kalimantan sebelum adanya pembatasan dengan Dayak. Terjadinya konflik perpecahan dan adu domba yang pernah terjadi antara Dayak dan Melayu (Islam) mengakibatkan kelompok Pasir (atau sekarang Paser) diklaim bukan lagi Dayak berdasar sudut pandang masyarakat atau hal ini juga kerap terjadi bagi mereka yang semulanya Dayak lalu berpindah haluan kepercayaan menjadi Islam karena dianggap sudah meninggalkan kepercayaan asli khas Dayak.

Kendati demikian, sejarah awal mula Suku Paser sebelum era kesultanan yang dikumpulkan dari beberapa sumber, berbeda antara satu sumber dengan yang lain. Sumber-sumber internet tidak menyertakan referensi dan cenderung menuliskan bahwa suku Paser adalah suku Dayak yang hanya dipisahkan oleh administrasi dan kepercayaan, dan mereka dibedakan oleh Pemerintahan Belanda. Sementara berdasarkan penuturan masyarakat adat, suku Paser ada sebelum nama suku Dayak dibuat oleh orang-orang Belanda (Putra, 2017: 92-93), sehingga suku Paser bukan suku Dayak walaupun masih berkerabat dekat. Akan tetapi di tengah informasi yang simpang siur tersebut, dapat dipastikan perbedaan utama mereka yakni suku Paser umumnya menganut agama Islam.

Suku Paser bermata pencaharian di bidang pengolahan lahan dan masih kental dengan kesenian tradisionalnya yang sarat berbagai nilai budaya. Salah satu nilai budaya yang dianut Suku Paser adalah simbolisme burung enggang, yang juga menjadi simbol warga asli Kalimantan. Burung enggang merupakan burung bertubuh besar namun bersikap ramah dan melindungi burung-burung yang lebih kecil di sekitarnya, dengan begitu masyarakat Paser tak boleh membeda-bedakan dan harus saling

berteman tanpa menghiraukan latar belakangnya (Putra, 2017: 127). Simbolisme ini menunjukkan bahwa secara turun-temurun masyarakat Paser selalu terbuka dengan multikulturalisme, dengan mengakui adanya perbedaan antar individu maupun kelompok (dilambangkan dengan adanya burung-burung lain di sekitar burung enggang), namun memperlakukan satu sama lain dengan sama terlepas budaya asalnya, tanpa merasa dirinya sendiri inferior (dilambangkan dengan burung berukuran besar).

Dalam perjalanan sejarahnya tersebut, Suku Paser diinterpretasi sebagai salah satu suku bangsa tertua di Pulau Kalimantan dengan peradaban yang berkembang di pesisir, pedalaman, dan keraton. Suku Paser berasal dari keturunan Bansu Tatau Datai Danum (manusia yang hidup di tepi sungai, pantai, atau danau) dan terbagi menjadi sembilan subsuku berdasarkan Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu Paser Luangan, Paser Telake (Tikas & Nyawo) terus po Bentian dan Benuaq, Paser Pematang, Paser Migi, Paser Peteban (Leburan), Paser Bukit Bura Mato, Paser Adang (Semunte), Paser Balik, dan Paser Pemuken (Putri, Hidayat, & Azkia, 2022: 247). Berdasar kajian terhadap budaya Suku Paser yang ada sekarang, kiranya belum cukup lengkap untuk dapat merumuskan implementasi budaya Suku Paser dalam Kota Nusantara. Maka dari itu, untuk mengetahui identitas Suku Paser secara presisi diperlukan riset mendalam yang berbasis seni dan budaya. Kedua sektor ini menjadi penting karena diperlukan untuk melacak sejarah budaya Suku Paser, sementara riset seni diperlukan untuk memahami dimensi yang tersirat atau yang bersifat subtekstual dari budaya yang direkam.

Berdasarkan kondisi budaya yang telah dijabarkan di atas, langkah riset yang diharapkan adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*) untuk mendalami sejarah budaya baik yang masih lestari maupun tidak yang direkam secara literal, tanpa mengeliminasi narasi-narasi minor (berbeda dengan narasi utama), melainkan berusaha memetakan beragam narasi yang ditemukan. Metode observasi partisipatoris yang khas dalam kajian etnografi pada ilmu antropologi juga patut dipertimbangkan. Sementara itu, langkah terbaik bagi kajian seni agaknya

melalui residensi seniman. Residensi seniman adalah proses seniman untuk tinggal bersama maupun mengalami kehidupan seni dan budaya masyarakat setempat dalam waktu tertentu, untuk setelahnya dibuat karya yang merupakan buah dari inspirasi yang didapatkan seniman selama mempelajari budaya tersebut. Keunggulan residensi seni adalah kayanya pengetahuan seniman akan budaya terkait sehingga dapat menginspirasi karya-karyanya, bahkan pasca residensi, sekaligus menunjukkan kepada publik dalam berbagai skala (regional, nasional, maupun internasional) wujud dari ide-ide subtekstual yang dalam masyarakat kerap kali dianggap abstrak. Tanpa melupakan fakta bahwa karya seni sangat mungkin dimonetisasi, upaya ini semakin potensial jika melibatkan seniman Indonesia yang sudah bertaraf internasional.

Lebih lanjut, upaya integrasi budaya perlu dibarengi dengan menjamin kesejahteraan pelaku budaya. Pasalnya, masyarakat Paser telah mengalami konflik tanah yang berkepanjangan, bahkan sejak era Orde Baru (Hidayat, 2023: 145-147). Masalah utama bertumpu pada masyarakat adat yang telah mengolah tanah sejak masa Kerajaan Paser, namun ketika telah menjadi bagian dari Republik Indonesia, tanahnya digunakan untuk pertambangan milik negara maupun swasta tanpa berkesempatan untuk mengajukan protes maupun gugatan. Hingga proyek IKN mulai dirumorkan dengan serius, bahkan ketika Peraturan Perundang-undangnya belum dibentuk, mereka mulai harus menghadapi calo-calo tanah sembari memperjuangkan hak tanah mereka atas yang tengah ditambang (Hidayat, 2023: 145). Berita terkini yang diliput oleh *Kompas* pada bulan Desember lalu menyatakan, kepala adat suku Paser Balik harus memutar otak untuk menghidupi keluarga setelah tanahnya diambil dan diganti rugi (Sucipto, 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa warga tidak hanya butuh uang ganti rugi untuk meredakan kesulitan hidupnya. Meski OIKN menyadari bahwa uang saja tidak cukup dan masyarakat setempat harus dapat diberdayakan, pemangku kebijakan belum mempertimbangkan perbedaan antara daerah yang akrab dengan kehidupan urban dan tradisional. Hal ini dikarenakan langkah pemberdayaan kepada masyarakat Paser

berupa pelatihan barista, menjahit, desain, dan sejenisnya, yang pada dasarnya sulit digunakan tanpa dibarengi kemampuan untuk mempenetrasi kehidupan urban yang nantinya memenuhi IKN. Harapannya, masyarakat dapat diajak untuk menyelami langsung kehidupan urban dengan memberi ruang bagi mereka dalam jajaran Aparatus Sipil Negara (ASN) maupun dalam perusahaan swasta yang akan hadir di IKN.

Integrasi juga perlu dibarengi dengan mengantisipasi dan menyelesaikan masalah sosial yang muncul di daerah Kalimantan Timur dengan menjaring komunikasi yang luas. Masalah tidak cukup hanya berdasar berdasar pengalaman penyusunan kebijakan yang terkonsentrasi fokusnya pada kondisi yang banyak terjadi di Jawa. Tidak dapat pula dipukul rata sesuai perspektif para pemangku adat. Pasalnya, warga Paser sendiri merasa dengan dilibatkannya pemangku adat Paser semata, seperti yang selama ini dilakukan pemerintah pusat, terdapat suara-suara warga yang tak terdengar (Nugroho, 2022). Hal ini meliputi pula etnis-etnis lain selain Suku Paser yang telah menetap sejak lama di daerah bakal IKN, mereka juga seharusnya merasakan keinklusifan yang diinginkan OIKN. Pemetaan-pemetaan masalah tiap sektor juga memerlukan observasi partisipatoris.

### ***Pelibatan pelaku dan referensi seni-budaya lokal***

Dari diskusi “Membangun Ekosistem Seni dan Budaya di Ibu Kota Nusantara”, diketahui bahwa IKN akan dibangun sebagai kota yang futuristik, sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap mempertahankan *local wisdom* yang ada. Dapat dipahami bahwa seni dan budaya akan berfungsi sebagai perekat antarperbedaan maupun sebagai *branding* dan strategi pembangunan yang dianggap paling ramah serta mudah diterima masyarakat. Dengan informasi belakangan bahwa OIKN akan membawa serta pelaku-pelaku seni dan budaya dari Jawa seperti Yogyakarta ke IKN (Arista, 2024). Hal ini dapat mengindikasikan bahwa pelaku, ilmu atau metode, maupun peralatan seni dan budaya yang dianggap mampu membantu melaksanakan visi tersebut memang masih terkonsentrasi di Jawa.

Hal ini dapat dimengerti lantaran geliat seni dan budaya modern melalui festival, pameran, dan termasuk fasilitas pendidikan lebih banyak berkembang di kota-kota besar di Jawa seperti Jakarta, Bandung, atau Yogyakarta. Oleh karena itu, tidak menjadi permasalahan apabila upaya pengembangan ekosistem seni dan budaya di IKN mengundang rekan-rekan pelaku seni dan budaya dari Jawa, namun diperlukan pembatasan tupoksi. Mereka dapat membawa metode riset, residensi, manajemen, maupun teknis penciptaan karya, namun konten dari karya seni dan budaya yang dipresentasikan hendaknya berangkat dari referensi lokal dan kehadiran mereka hendaknya menjadi ajang pertukaran pengetahuan bagi pelaku seni dan budaya lokal yang juga perlu ditelusuri keberadaannya.

Pelibatan pelaku seni dan referensi lokal merupakan aspek krusial dalam pengembangan ekosistem seni dan budaya yang inklusif di Indonesia (Lufiani & Sabana, 2016). Pelaku seni, baik itu seniman, musisi, penulis, atau pengrajin, adalah agen utama dalam menyampaikan dan mewujudkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah lewat karya-karya mereka. Namun demikian, mengingat bahwa seni modern tidak terbatas oleh hal-hal yang kasat mata seperti objek-objek lukisan tertentu atau corak dan gaya tertentu, tetapi juga ditentukan oleh sikap batin senimannya (Soedarso, 2000). Oleh karena itu, pelibatan pelaku seni dan budaya lokal amat penting supaya karya seni yang tampil dapat mengekspresikan sikap batin dari orang asli. Mereka juga dapat menyampaikan aspirasi, nilai, dan realitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat lewat karya seni dan budaya mereka (dalam kasus tulisan ini yakni suku Paser), yang tidak dapat dijamah oleh pelaku seni dari luar. Selain itu, pelibatan mereka akan memastikan bahwa perspektif lokal dihormati dan dipertimbangkan dengan serius, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Sembari pelaku lokal dilibatkan, referensi lokal juga memainkan peran penting sebagai sumber inspirasi dalam membentuk ekosistem seni dan budaya yang terhubung dengan akar budaya daerah. Referensi lokal tersebut meliputi tradisi, cerita rakyat, dan kearifan lokal yang mencakup

berbagai aspek seperti ritual, pakaian adat, seni rupa, seni musik, dan lain-lain.

Melihat dan mempertimbangkan peran penting dari terlibatnya pelaku seni dan referensi lokal tersebut, maka terdapat pola-pola kebijakan yang dapat dilakukan pemerintah untuk melibatkan dua aspek tersebut. Pertama, seperti biasa, pemerintah dan lembaga budaya memfasilitasi kegiatan pelaku dan komunitas seni dan budaya lokal melalui program residensi seniman, lokakarya, dan festival budaya. Kedua, mendukung dan memberdayakan subjek-subjek terkait melalui pendanaan, pelatihan, dan infrastruktur. Ketiga, menghargai dan melestarikan referensi lokal sebagai bagian integral dari identitas budaya suatu daerah. Hal yang dapat dilakukan sehubungan dengan itu misalnya menyajikan hidangan khas Paser hasil masakan koki yang merupakan orang Paser, pembuatan rumah-rumah arsitektur Paser berbahan modern dan sebaliknya implementasi motif tradisional pada arsitektur futuristik, kewajiban memiliki baju tradisional kalimantan, sajian dengan bahasa Paser, dan lain-lain.

## PENUTUP

Alih-alih terjebak pada Jawanisasi yang terus mendominasi dan berpotensi melemahkan kekayaan seni dan budaya lokal lainnya di Indonesia, penyelenggaraan dan pembangunan IKN perlu menjadi titik balik pemerintah Indonesia untuk mengedepankan pengembangan ekosistem seni dan budaya yang berbasis multikulturalisme di ibu kota baru, sehingga selaras dengan Bhinneka Tunggal Ika selaku semboyan negara maupun visi IKN itu sendiri. Multikulturalisme dapat dimulai dengan pengintegrasian suku Paser selaku penduduk lokal ke dalam kehidupan urban IKN yang perlu didahului lewat observasi partisipatoris. Observasi partisipatoris berguna untuk menyusun substansi sejarah budaya suku Paser. Selain itu, observasi partisipatoris berguna untuk menjaring faktor-faktor potensi konflik yang lebih mendalam sebagai dasar merumuskan kebijakan sosial baik yang bersifat preventif maupun penanggulangan. Terlepas dari observasi partisipatoris, residensi seniman guna memproses atmosfer berkesenian dengan inspirasi

lokal yang kuat juga dapat diaplikasikan dalam mengembangkan ekosistem seni dan budaya di IKN.

Meskipun upaya mengembangkan ekosistem seni dan budaya di IKN membutuhkan kerja sama pelaku-pelaku seni dan budaya dari Jawa yang selama ini menjadi episentrum berkesenian, namun kehadiran mereka hendaknya berada di ranah keilmuan atau metode. Substansi dari karya yang dipresentasikan perlu mengangkat kearifan lokal suku Paser maupun suku-suku lain di Indonesia. Kehadiran mereka juga diharapkan menjadi mitra dalam pertukaran pengetahuan dengan pelaku seni dan budaya lokal. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana dalam mendukung terciptanya situasi tersebut.

Apabila integrasi suku Paser berhasil, bukan tidak mungkin upaya multikulturalisme yang lebih besar, yakni menampilkan keberagaman nasional dari 38 provinsi dalam satu kota IKN, semakin mungkin terlaksana. Konsep keberagaman seni dan budaya seluruh Indonesia semacam itu dapat menjadi identitas paten IKN itu sendiri. Seluruh langkah ini secara garis besar perlu untuk menjadi perhatian dan diterapkan oleh OIKN selaku pemangku kebijakan agar ibu kota negara baru Indonesia tidak hanya eksklusif bagi pemerintah dan investor semata. Pada akhirnya, dapat dipahami bahwa upaya de-Jawanisasi melalui multikulturalisme di atas tidak bertujuan untuk menghilangkan budaya Jawa dari panggung kebudayaan nasional. Akan tetapi, bertujuan untuk mengembalikan budaya dari tiap suku sebagai sesama representasi kebinekaan negara Indonesia, tanpa salah satu dianggap adiluhung daripada yang lain.

## PUSTAKA ACUAN

- Abidin. [IKN Indonesia]. (2023, 6 Agustus). Nusantara Talks: Membangun Ekosistem Seni dan Budaya di Ibu Kota Nusantara [Video]. *Youtube*. [https://youtu.be/AmOr\\_SUcbW8?si=furZ-8uuqz8UXoZE](https://youtu.be/AmOr_SUcbW8?si=furZ-8uuqz8UXoZE)
- Arista, R. (ed.). (2024, 18 Maret). Tak Mau IKN garing, Pemerintah Ingin Hadirkan “ARTJOG” dan “Biennale Jogja” [Video]. *Kompas*. <https://video.kompas.com/watch/1319447/tak-mau-ikn-garing-pemerintah-ingin-hadirkan-artjog-dan-biennale-jogja>

- Coedès, G. (2015). *Asia Tenggara Masa Hindu-Buddha*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hermanu. (2010). *Borneo 1843*. Yogyakarta: Bentara Budaya Yogyakarta.
- Hidayat, R. (2023). Konflik Agraria Masyarakat Adat dalam Pemindahan Ibu Kota Negara. *Prosiding Konferensi Nasional Sosiologi (PKNS)*, 1(1), 140-151.
- Geertz, C. (1960). *The religion of Java*. New York: The Free Press of Glencoe.
- Lufiani, A. & Sabana, S. (2016). Kontribusi Inovatif Seni dan Budaya pada Masyarakat Urban. *Conference Proceeding: 2nd International Conference on Creative Media, Design & Technology*.
- Mulder, N. (2001). *Mistisisme Jawa: Ideologi di Indonesia*. Yogyakarta: LKIS.
- Mulder, N. (2005). *Inside Indonesian Society: cultural change in Java Third Edition*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Nisa, F. (2023). Motif Batik Kupang Nusa Tenggara Timur: Motif yang Terinspirasi dari Tenun Ikat. (2023, 9 Januari), *Good News From Indonesia*, diakses dari: <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/01/09/motif-batik-kupang-nusa-tenggara-timur-motif-yang-terinspirasi-dari-tenun-ikat>
- Nugroho, B. E. (2022). Perlindungan hak masyarakat adat dalam pemindahan ibukota negara. *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)*, 6(1), 83-97.
- Pemerintah Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan*.
- Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara*.
- Putra, W. I. (2017). *Peran Lembaga Adat Paser dalam pelestarian nilai-nilai sosial budaya lokal di Kabupaten Paser Kalimantan timur* (Disertasi doctoral, Pascasarjana).
- Putri, I.A., Hidayat, Y., & Azkia, L. (2022). Paser Bekerai Sebagai Kelompok Sosial Bagi Masyarakat Paser Di Tanah Grogot Kabupaten Paser Kalimantan Timur. *JTAMPS: Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, 2(2): 245-259.
- Riyanto, S., Febrian, & Zanibar, Z. (2023). Bhinneka Tunggal Ika: Nilai dan Formulasinya dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 20(2): 1-13.
- Sucipto. (2023). Siasat Hidup Warga di Tengah Proyek IKN. (2023, 16 Desember). *Kompas*, diakses dari: <https://www.kompas.id/baca/>

- nusantara/2023/12/10/siasat-hidup-warga-di-tengah-proyek-ikn
- Sutarto, A. (2006). Becoming a true Javanese: A Javanese view of attempts at Javanisation. *Indonesia and the Malay World*, 34(98), 39-53. <https://doi.org/10.1080/13639810600650893>
- Sp, Soedarso. (2000). *Sejarah Perkembangan Seni Rupa Modern*. Jakarta: CV. Studio Delapan Puluh Enterprise.
- Thornton, D. L. (1972). *The Javanization of Indonesian Politics*. (Tesis). Department of Political Science, The University of British Columbia, Vancouver.
- Timbul. [IKN Indonesia]. (2023, 6 Agustus). Nusantara Talks: Membangun Ekosistem Seni dan Budaya di Ibu Kota Nusantara [Video]. *Youtube*. [https://youtu.be/AmOr\\_SUcbW8?si=furZ-8uuqz8UXoZE](https://youtu.be/AmOr_SUcbW8?si=furZ-8uuqz8UXoZE)
- Tridakusumah, A. C., Supyandi, D., & Sukayat, Y. (2015). "Social Identity, Ethnicity and Internal Mobility in Indonesia", Dalam *Ist UPI International Conference on Sociology Education*. Atlantis Press.
- Tridianto, A. (2005). "Memelihara Kesatuan dengan Menghormati Keragaman", Dalam J. J. Darmawan (ed.), *Multikulturalisme: Membangun Harmoni Masyarakat Plural*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ward, K. (2010). "Soeharto's Javanese Pancasila", Dalam Edward Aspinall & Greg Fealy (ed.), *Soeharto's New Order and its Legacy: Essays in honour of Harold Crouch*. Canberra: ANU E Press.

